**PEMBERIAN SANKSI BERJENJANG
SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN *CIVIC DISPOSITION*
BERUPA SIKAP JUJUR DAN DISIPLIN PADA SANTRI
(STUDI DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM KECAMATAN
TANON, KABUPATEN SRAGEN)**

Dewi Ayu Ningsih, Winarno, Muhammad Hendri Nuryadi
Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta
E-mail: ningsih_99@student.uns.ac.id, winarno.ppknuns@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) pelaksanaan pemberian sanksi berjenjang sebagai upaya membangun *civic disposition* sikap jujur dan disiplin; dan 2) tingkat kejujuran dan kedisiplinan santri antara santri yang pernah menerima sanksi berjenjang dengan santri yang tidak menerima sanksi berjenjang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen dan angket. Wawancara dilakukan terhadap pengasuh, pengurus dan santri. Observasi terhadap pengurus ketika pemberian sanksi berjenjang dan pemberian pemahaman mengenai karakter kewarganegaraan terhadap santri. Studi dokumen terhadap data pelanggaran yang dilakukan santri, tata tertib pesantren, jenis pelanggaran dan sanksi, daftar kegiatan dan foto ketika pemberian sanksi berjenjang. Angket berupa tingkat kejujuran dan kedisiplinan santri. Pengujian validitas data memakai triangulasi data dan metode. Analisis data memakai model analisis interaktif. Simpulan hasil penelitian: 1) pelaksanaan pemberian sanksi berjenjang sesuai dengan prosedur pemberian sanksi yaitu: a) hukuman diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh santri; b) hukuman diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dan memiliki kesan positif bagi santri; c) pemberian hukuman harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan. 2) tingkat kejujuran dan kedisiplinan santri antara santri yang pernah menerima sanksi berjenjang dengan yang tidak menerima sanksi berjenjang berbeda. Santri yang pernah menerima sanksi berjenjang memiliki tingkat kejujuran dan kedisiplinan yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan santri yang tidak menerima sanksi berjenjang.

Kata Kunci: Sanksi Berjenjang, *Civic Disposition*, Jujur, Disiplin

Abstract

This study aims to determine: 1) the implementation of tiered sanctions as an effort to build civic disposition in the form of honesty and discipline; and 2) the level of honesty and discipline of students between students who have received tiered sanctions and students who have not received tiered sanctions. This research is a descriptive qualitative research. Collecting data using interviews, observations, document studies and questionnaires. Interviews were conducted on caregivers, administrators and students. Observation of the administrators when giving tiered sanctions and providing an understanding of the citizenship character of students. Document studies on data on violations committed by students, boarding school rules, types of violations and sanctions, list of activities and photos when giving tiered sanctions. Questionnaire in the form-of the level of honesty and discipline of

students. Testing the validity of the data using the data triangulation analysis model and method triangulation. Data analysis uses an interactive analysis model. The conclusions of the research are: 1) the implementation of tiered sanctions is in accordance with the procedures for providing sanctions, namely: a) punishments are given according to the level of violations committed by students; b) punishment is given based on mutual agreement and has a positive impression on the santri; c) the provision of punishment must take into account the impact. 2) the level of honesty and discipline of students between students who have received tiered sanctions and those who have not received tiered sanctions are different. Santri who have received tiered sanctions have a lower level of honesty and discipline when compared to students who have not received tiered sanctions.

Keywords: *Tiered Sanctions, Civic Disposition, Honest, Discipline*

PENDAHULUAN

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan membuat sumber daya manusia menjadi kurang berkualitas, terlebih lagi diketahui bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang banyak menjadikan pendidikan kurang merata di setiap daerahnya. Untuk itu, usaha yang dapat dilakukan sehingga dapat mewujudkan potensi manusia yang memadai dan berkarakter diperlukannya pendidikan yang kuat. Pendidikan yang diajarkan bukan semata-mata hanya digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan ilmu pengetahuan melainkan juga sebagai sarana pembentukan karakter. Karakter seseorang harus ditamamkan sejak dini karena apabila karakter ditanamkan sejak dini maka karakter tersebut memiliki kecenderungan untuk lebih mudah dibentuk. Menurut Muhammad Alhadika, dkk (2021: 149) keadaan lingkungan dalam lingkup pendidikan karakter mempunyai kedudukan esensial karena pergantian perilaku peserta didik akibat proses pendidikan karakter yang sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, atau dapat disebut bentuk dan

implementasi lingkungan yang meliputi lingkungan fisik dan budaya.

Dalam pendidikan nasional pun juga terkandung fungsi pendidikan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan kekuatan dan penciptaan karakter serta peradaban yang berkedudukan yang nantinya digunakan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Winarno (2014: 186) "Pendidikan nilai memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak, dan pendidikan karakter, atau pendidikan budi pekerti, meskipun ada sementara pihak yang menyatakan pendidikan nilai lebih luas dari pendidikan moral". Dalam pendidikan ada istilah *civic education*. Dimana *civic education* memiliki tiga komponen, komponen tersebut perlu dimiliki seseorang agar menjadi warga yang cerdas, berkarakter dan partisipatif, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* (Winarno, 2014: 176). *Civic disposition* adalah bagian dari komponen pendidikan kewarganegaraan, yang juga disebut sebagai sikap, watak atau karakter kewarganegaraan. Branson (1999: 23) memberikan pengertian terhadap sikap kewarganegaraan yang

menunjukkan pada karakter privat dan karakter publik yang penting untuk pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional (Witman Syahroni, dkk., 2016: 91). Ciri-ciri karakter privat seperti disiplin diri, tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap nilai dan martabat dari setiap orang dan hal tersebut merupakan keharusan. Ciri-ciri karakter publik juga tidak kalah penting. Ciri-cirinya yaitu kesopanan, semangat publik, pemikiran kritis, penghormatan terhadap aturan hukum dan kemauan untuk mendengarkan dan bernegosiasi serta kompromi yang diperlukan untuk kesuksesan demokrasi.

Pendidikan karakter yang akan dibahas dikerucutkan menjadi dua yaitu berkaitan dengan karakter privat yang ada dalam komponen *civic disposition*, dua hal tersebut berkaitan dengan sikap jujur dan disiplin. Jujur merupakan sikap yang dimiliki seseorang dimana ketika ia berhadapan dengan sesuatu maka ia akan menceritakan kejadian yang terjadi tanpa melakukan perubahan/modifikasi sedikitpun atau dengan kata lain akan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi sesuai dengan realita yang ada. Sedangkan disiplin merupakan sikap seseorang yang mampu patuh kepada aturan dalam instansi atau lembaga tertentu, baik lembaga yang ada di masyarakat, bangsa dan negara. Untuk membangun karakter atau watak kewarganegaraan pada seseorang memang bukanlah suatu hal yang mudah karena dalam upaya membangun karakter atau watak kewarganegaraan pada seseorang membutuhkan proses yang terbilang cukup rumit. Selain di sekolah, upaya membangun karakter atau watak

kewarganegaraan juga dapat dilakukan di lembaga lain, salah satunya adalah lembaga masyarakat yaitu pesantren.

Pondok Pesantren Darussalam merupakan salah satu lembaga masyarakat yang mendidik para santrinya untuk memiliki karakter atau watak kewarganegaraan. Salah satu upaya yang ditempuh pihak pesantren adalah dengan menerapkan hukuman atau sanksi bagi santri yang melakukan kesalahan, utamanya berkaitan dengan sikap jujur dan disiplin. Sanksi yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Darussalam adalah sanksi berjenjang. Sanksi berjenjang berasal dari dua kata yaitu sanksi dan berjenjang. Sanksi merupakan hukuman, tindakan paksaan atau pelanggaran (Sofiyah Ramdhani, 2002: 49). Sedangkan berjenjang bermula dari kata jenjang atau janjang yang artinya tingkat atau tangga. Jadi berjenjang adalah bertingkat-tingkat. Sehingga, sanksi berjenjang dapat disebut sebagai hukuman, ganjaran yang bertingkat.

Pemberian sanksi berjenjang pada santri disebabkan masih banyak santri yang melakukan kesalahan berkaitan dengan tata tertib atau peraturan yang berlaku pesantren, utamanya berkaitan dengan sikap jujur dan disiplin. Berdasarkan wawancara dan observasi awal yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam masih dijumpai kasus pelanggaran yang berkaitan dengan sikap jujur dan disiplin pada santri. Salah satu kasus pelanggaran yang berkaitan dengan sikap jujur yaitu ditemukannya kasus pencurian dan pelanggaran terhadap sikap disiplin yaitu berupa kasus terlambat santri dalam mengikuti kegiatan pesantren. Selaras dengan hasil wawancara

dengan pengurus yang ada di Pondok Pesantren Darussalam bahwa kasus pencurian yang dilakukan oleh santri dapat terjadi kurang lebih 1 sampai 2 orang setiap bulannya, sedangkan untuk kasus pelanggaran tata tertib berkaitan dengan sikap disiplin santri yaitu terlambat mengaji dengan persentase terlambat hingga 50% setiap bulannya serta terlambat sholat berjama'ah hingga mencapai 70% setiap bulannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darussalam Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Penelitian ini memakai metode kualitatif, sebab hasil penelitian menampilkan obyek yang diteliti berupa orang, lembaga atau yang lainnya yang berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha menampilkan data deskriptif berbentuk informasi atau tanggapan dari informan, observasi lapangan dan studi dokumen yang memiliki hubungan dengan objek. Penelitian ini memiliki fokus pada pemberian sanksi berjenjang sebagai usaha dalam menumbuhkan watak kewarganegaraan berupa sikap jujur dan disiplin pada santri.

Sumber data penelitian ini didapatkan dari informan, tempat, peristiwa serta dokumen terkait. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Goetz dan Le Compte menyatakan bahwa "*Purposive Sampling* yaitu teknik mendapatkan sampel dengan memilih individu-individu yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi

sumber data" (H.B Sutopo, 2002: 185).

Menurut uraian di atas, penelitian ini memakai informan kunci atau *key informan* yaitu informasi yang diperoleh berasal dari orang-orang yang dipercaya mengetahui informasi yang akan diteliti yaitu pengasuh atau kepala pesantren, ketua pesantren, seksi keamanan pesantren serta para santri. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pengasuh atau kepala Pondok Pesantren Darussalam, ketua Pondok Pesantren Darussalam, seksi keamanan Pondok Pesantren Darussalam serta santri di Pondok Pesantren Darussalam. Selanjutnya, observasi penelitian dilakukan dengan cara mengamati kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, kegiatan yang diamati yaitu ketika ngaji bersama yaitu *ngaji amsilati*. Selain kegiatan belajar mengajar observasi juga dilakukan ketika para pengurus memberikan sanksi kepada santri yang berbuat kesalahan pada aturan yang berlaku di pesantren. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh santri, tata tertib Pondok Pesantren Darussalam, jenis pelanggaran dan sanksi, daftar kegiatan pesantren dan foto-foto pelanggaran tata tertib oleh santri di Pondok Pesantren Darussalam.

Teknik uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kekurangan data dari salah

satu sumber atau salah satu metode, sehingga dapat dilengkapi dengan data dari sumber atau metode lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Darussalam untuk membangun *civic disposition* utamanya berkaitan dengan sikap jujur dan disiplin pada santri yaitu dengan melakukan pemberian hukuman terhadap santri yang berbuat kesalahan, sanksi yang digunakan yaitu sanksi berjenjang. Pemberian sanksi berjenjang kepada santri berlangsung saat santri ada di pesantren dan saat santri ada di masyarakat. Sanksi berjenjang yang diberikan bagi pelanggar dibuat dalam sebuah aturan yang sekaligus digunakan sebagai pranata pembelajaran *civic disposition* utamanya berkaitan dengan sikap jujur dan disiplin. Adapun mengenai pelaksanaan pemberian sanksi berjenjang sebagai upaya membangun *civic disposition* berupa sikap jujur dan disiplin pada santri yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman Diberikan Sesuai Tingkat Pelanggaran yang Dilakukan oleh santri

Hukuman diberikan kepada santri yang berbuat kecurangan terhadap aturan yang berlaku, mulai dari yang paling kecil yaitu berupa teguran sampai yang paling besar berupa di keluarkan dari pesantren secara hormat. Hukuman diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat, memiliki tujuan agar tidak menimbulkan konflik antar santri. Pemberian sanksi juga tidak boleh menyalahi aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kecurangan

antara santri yang menerima sanksi dengan pengurus yang memberikan sanksi. Hukuman yang diberikan kepada santri memang bukan hukuman secara lisan saja melainkan juga hukuman secara fisik, hal tersebut memiliki tujuan agar santri sadar akan kesalahan yang telah diperbuat dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Hukuman secara fisik diberikan kepada santri apabila dirasa perbuatan yang dilakukan sudah sangat berat dan tidak bisa di toleransi lagi. Seperti hasil wawancara dengan salah satu pengurus yang memberikan penjelasan bahwa ketika hukuman hanya diberikan secara lisan, maka santri akan memiliki potensi untuk melanggar tata tertib lebih besar karena akan banyak santri yang tidak menghiraukan hukuman lisan tersebut. Sejalan dengan pendapat Ahmad Tafsir (Muh Judrah, 2016: 50) bahwa hukuman dapat digunakan dalam pendidikan apabila dirasa sudah sangat terpaksa.

Memberikan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun *civic disposition*, karena pada saat pemberian hukuman santri diberikan pemahaman mengenai karakter yang seharusnya dimiliki oleh santri yaitu karakter yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tersebut berisi larangan dan perintah yang dijadikan sebagai sarana untuk membangun *civic disposition* utamanya berkaitan dengan sikap jujur dan disiplin. Mulai dari

hukuman yang paling ringan yaitu teguran secara lisan. Ketika diberikan teguran, santri akan diberikan pemahaman mengenai sikap baik dan buruk, diberikan kesempatan untuk menjelaskan kronologi terjadinya pelanggaran. Sehingga secara tidak langsung akan dapat melatih santri untuk berkata jujur, selain sikap jujur yang dibangun, pemberian hukuman kepada santri juga memberikan efek jera yang membuat santri tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat bersikap lebih disiplin.

2. Hukuman Diberikan Berdasarkan Kesepakatan Bersama dan Memiliki Kesan Positif Bagi Santri

Tata tertib yang dibuat oleh pengurus dengan persetujuan dari pengasuh atau kepala Pondok Pesantren Darussalam, berisi larangan dan perintah yang wajib ditaati oleh para santri, baik santriwan maupun santriwati. Pembuatan tata tertib atau peraturan pesantren bertujuan untuk menghindari kecurangan ketika pemberian hukuman yang dilakukan penghukum kepada terhukum. Tata tertib yang dibuat juga berisi jenis pelanggaran dan hukuman yang diberikan, kemudian dijadikan sebagai dasar operasional pemberian sanksi berjenjang sekaligus pranata pembelajaran *civic disposition* terutamanya berkaitan dengan sikap jujur dan disiplin.

Pemberian hukuman juga bertujuan untuk memberikan dampak atau kesan positif bagi santri, salah satunya

yaitu membuat santri menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat dan menimbulkan efek jera pada santri sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Schultz (Azam Syukur Rahmatullah, 2021: 75) bahwa hukuman dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengubah diri individu yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan dan menjadikan pribadi seseorang tersebut lebih sehat dan positif.

Sehingga dapat diketahui bahwa dengan memberikan hukuman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Selanjutnya, juga dapat memberi dampak positif untuk santri seperti, lebih menaati aturan yang ada dan tujuan dari adanya pemberian sanksi berjenjang dapat lebih mudah untuk diwujudkan.

3. Pemberian Hukuman Harus Memperhatikan Dampak yang Ditimbulkan

Pemberian hukuman kepada santri harus tetap memperhatikan dampak yang ditimbulkan utamanya yaitu dampak positif, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hukuman akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Arigbo & Adeogun (Azam Syukur Rahmatullah, 2021: 75) bahwa hukuman dapat diberikan kepada siapa pun dan instansi mana pun, baik itu instansi berbasis islam atau pun tidak karena hukuman yang diberikan pada akhirnya

akan memberikan sebuah hal yang bermakna.

Berikut ini merupakan dampak positif yang timbulkan dari pemberian sanksi berjenjang di Pondok Pesantren Darussalam:

a. Menyadarkan santri akan kesalahan yang telah dilakukan

Hukuman berupa sanksi berjenjang yang diberikan kepada santri bukan semata-mata untuk membuat santri takut, melainkan bertujuan untuk membuat santri menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Apabila santri sudah mampu menyadari kesalahan yang mereka perbuat, maka santri akan memiliki kecenderungan untuk mau berubah menjadi individu yang lebih baik lagi. Banyak dari santri yang ketika mereka melakukan suatu kesalahan tetapi tidak diberikan teguran maka mereka tidak akan menyadari bahawa perbuatan yang lakukan itu salah, sehingga mereka dapat mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari. Sejalan dengan pendapat Kartini Kartono (M. Wisnu Khumaidi, 2020: 140) yang memberikan beberapa tujuan hukuman dalam pendidikan yaitu salah satunya adalah mengubah pribadi yang bersangkutan agar sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu, dapat diketahui dengan jelas bahwa pemberian hukuman atau sanksi kepada santri memiliki dampak positif yaitu agar

santri mampu menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan.

b. Menimbulkan rasa jera pada santri sehingga santri tidak mengulangi kesalahannya lagi

Pemberian hukuman berupa sanksi berjenjang juga memiliki dampak lain, selain menyadarkan santri akan perbuatan yang dilakukan itu salah. Pemberian sanksi berjenjang juga memberikan dampak membuat santri jera dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rahmatullah (Azam Syukur Rahmatullah, 2021: 77) bahwa hukuman di pesantren merupakan upaya untuk memperbaiki diri para pelanggar agar kembali lurus ke jalan yang benar. Setelah santri sadar akan kesalahan yang diperbuat tentu santri akan berpikir lagi apabila hendak melakukan kesalahan, selain itu dengan adanya hukuman santri akan merasakan dampak yang tidak mereka inginkan. Sehingga dengan hal tersebut santri akan lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.

Seperti yang telah dipaparkan di atas pemberian sanksi berjenjang kepada santri mampu memberikan dampak positif bagi santri, tetapi ternyata pemberian sanksi berjenjang kepada santri juga memberikan dampak negatif bagi santri. Dampak negatif tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Akan timbul rasa dendam dari santri terhadap penghukum

Dampak negatif yang pertama yaitu akan timbul rasa dendam dari diri santri kepada penghukum, hal tersebut dikarenakan santri tidak terima apabila dirinya mendapatkan hukuman. Namun, perasaan dendam yang dimiliki santri bukanlah perasaan dendam yang hebat melainkan hanya rasa kesal karena mendapatkan hukuman. Perasaan dendam yang timbul dari diri santri berawal dari santri yang melakukan kesalahan tetapi tidak mau untuk mengakui kesalahannya. Sehingga mereka akan berkelit dan akhirnya terjadi cekcok antara penghukum dengan santri yang terhukum. Tetapi tidak sedikit dari santri yang ketika mendapatkan hukuman mereka juga dengan lapang dada menerima dan mau menanggung resiko atas perbuatan yang telah mereka dilakukan. Sejalan dengan pendapat Purwanto (Syaiful Arif & Sma'i, 2015:13) bahwa tidak dapat dipungkiri jika dalam pemberian hukuman dapat menimbulkan rasa dendam dari terhukum kepada penghukum apabila hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan aturan dan mengandung sebuah ancaman. Oleh sebab itu, ketika memberikan hukuman kepada santri, baik dari terhukum maupun penghukum harus sama-sama dalam keadaan yang tenang dan memiliki emosi yang stabil. Selain itu, pemberian hukuman juga harus sesuai

dengan prosedur pemberian sanksi agar tidak terjadi kecurangan serta menimbulkan rasa takut dan dendam dari diri santri.

- b. Santri akan lebih pandai dalam menyembunyikan kesalahan dan tidak menimbulkan efek jera

Selain menimbulkan rasa dendam pada diri santri, pemberian sanksi berjenjang juga memberikan dampak negatif lain yaitu membuat santri pandai dalam menyembunyikan kesalahan yang pada akhirnya tidak menimbulkan efek jera pada santri. Biasanya ini terjadi pada santri yang sudah biasa mendapatkan hukuman atau lebih sering dihukum. Apabila pada kasus santri yang baru mendapatkan hukuman biasanya mereka akan lebih jujur terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Selain itu, untuk santri yang sudah biasa melakukan pelanggaran biasanya mereka juga menggampangkan kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak merasa jera dan memiliki kemungkinan melakukan pelanggaran lagi di kemudian hari.

- c. Akan menimbulkan rasa takut yang berlebih pada diri santri

Dampak yang selanjutnya yaitu akan timbul rasa takut yang berlebih pada diri santri. Rasa takut yang terjadi ini bukan rasa takut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, melainkan rasa takut berlebihan yang tidak wajar. Memang tidak

semua santri yang pernah dihukum akan merasakan takut yang demikian namun bagi santri yang memiliki mental yang lemah tentu akan membuat mereka menjadi takut. Sejalan dengan pendapat Rohmad (Azam Syukur Rahmatullah, 2021: 81) bahwa tidak semua santri yang mendapatkan hukuman akan menerima dengan lapang dada, tidak sedikit yang malah menjadi takut, tidak nyaman dan pada akhirnya keluar dari pesantren. Oleh karena itu, ketika memberikan sanksi berjenjang kepada santri harus memperhatikan prosedur pemberian sanksi dengan baik dan dilakukan tanpa ada unsur emosi sehingga santri tidak takut namun tetap memberikan efek jera pada santri.

Tingkat Kejujuran dan Kedisiplinan Santri antara Santri yang Pernah Menerima Sanksi Berjenjang dengan Santri yang Tidak Menerima Sanksi Berjenjang

Tingkat kejujuran dan kedisiplinan santri, antara santri yang pernah menerima sanksi berjenjang dengan santri yang tidak menerima sanksi berjenjang memang memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut memang tidak terlalu signifikan, berikut merupakan perbedaan antara santri yang pernah menerima sanksi berjenjang dengan santri yang tidak menerima sanksi berjenjang.

1. Tingkat Kejujuran antara Santri yang Pernah Menerima Sanksi Berjenjang dengan Santri yang Tidak Menerima Sanksi Berjenjang

Kejujuran merupakan sikap yang ditampilkan seseorang dengan mampu berkata dan bertindak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik secara niat, lisan dan perbuatan. Kejujuran dapat dibangun dari dalam diri seseorang maupun dari luar diri seseorang atau dengan kata lain pengaruh dari lingkungan sekitar. Seperti diungkapkan oleh Elfindri (Maulida Balqis Nafisa, 2020: 23) bahwa jujur berarti tidak ada kebohongan dan kecurangan sehingga jujur berarti hati yang lurus.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Darussalam dalam rangka membangun *civic disposition* berupa sikap jujur pada santri adalah melalui pemberian sanksi atau hukuman. Hukuman yang digunakan oleh pihak Pondok Pesantren Darussalam adalah hukuman yang bertingkat atau berjenjang sehingga disebut sebagai sanksi berjenjang. Sanksi berjenjang merupakan sanksi atau hukuman yang bertingkat, diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sehingga tingkat kejujuran santri dapat dilihat dari santri yang pernah menerima sanksi berjenjang dengan santri yang tidak menerima sanksi berjenjang. Perbedaan sikap antara santri yang pernah menerima sanksi berjenjang dengan santri yang tidak menerima sanksi berjenjang memang tidak terlalu signifikan. Perbedaan tersebut ditunjukkan dengan beberapa kasus yang sebagian besar berasal dari santri yang pernah menerima sanksi berjenjang, baik dengan kasus pelanggaran yang sebelumnya

pernah dilakukan maupun yang belum pernah dilakukan. Sebagai contoh, si A sebelumnya melakukan pelanggaran tata tertib berupa kasus *menggosop* atau meminjam barang tanpa izin, dan selang waktu beberapa bulan si A melakukan pelanggaran tata tertib berupa kasus pencurian. Memang tidak semua santri yang pernah menerima sanksi berjenjang akan melakukan pelanggaran lagi, tetapi kebanyakan kasus pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren Darussalam dilakukan oleh santri yang sebelumnya pernah menerima sanksi berjenjang.

Oleh sebab itu, baik dari santri maupun dari pihak pesantren harus saling bekerjasama dalam menjalankan segala kegiatan yang ada pesantren. Santri harus lebih taat pada aturan yang berlaku dan pihak pesantren harus mampu memberikan contoh kepada santri terkait perilaku yang baik dan sesuai dengan tata tertib atau perturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar watak atau karakter santri dapat terbangun dengan mudah dan bersifat permanen atau tidak hanya bersifat sementara.

2. Tingkat Kedisiplinan antara Santri yang Pernah Menerima Sanksi Berjenjang dengan Santri yang Tidak Menerima Sanksi Berjenjang

Disiplin adalah sikap yang ditunjukkan seseorang dengan mampu menaati segala tata tertib atau peraturan yang berlaku. Sesuai dengan pendapat Soegeng Prijodarminto (Arif Rakhman, 2011: 43) bahwa disiplin merupakan perilaku yang terbentuk dari berbagai macam proses yang ditunjukkan dengan

nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, ketertiban dan keteraturan.

Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, upaya yang digunakan oleh pihak Pondok Pesantren Darussalam dalam membangun sikap disiplin pada santri adalah melalui pemberian sanksi berjenjang. Selain sikap jujur, sikap disiplin pada santri juga terdapat sedikit perbedaan, perbedaan tersebut terjadi antara santri yang pernah menerima sanksi berjenjang dengan santri yang tidak menerima sanksi berjenjang. Kasus pelanggaran tata tertib berkaitan dengan sikap disiplin memang lebih besar jika dibandingkan dengan kasus pelanggaran berkaitan dengan sikap jujur. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya kasus pelanggaran yang berkaitan dengan sikap disiplin, seperti tidak ikut sholat jamaah, tidak ikut dzikir bersama, terlambat saat kegiatan ngaji bersama dan lain sebagainya, jika dibandingkan dengan pelanggaran terkait sikap jujur seperti mencuri, tidak membayar uang jajan sesuai harga, berbohong kepada penjual, dan lain sebagainya. Pelanggaran tata tertib berkaitan dengan sikap disiplin juga kebanyakan dilakukan oleh santri yang sebelumnya pernah mendapatkan hukuman. Seperti contoh, si B melakukan pelanggaran tidak ikut sholat jamaah, dikemudian hari si B melakukan pelanggaran lagi dengan tidak ikut dzikir bersama. Memang tidak semua santri yang pernah melanggar tata tertib akan melanggar lagi, biasanya pelanggaran yang terulang kembali hanya dilakukan oleh santri yang memang benar-

benar tidak bisa dinasehati dan memiliki sifat yang membangkang, sehingga diperlukan bimbingan khusus untuk santri yang memiliki sifat tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan serta dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian sanksi berjenjang di Pondok Pesantren Darussalam sudah cukup baik dan dapat digunakan sebagai upaya untuk membangun membangun *civic disposition* berupa sikap jujur dan disiplin pada santri. Selain itu, pemberian sanksi di Pondok Pesantren Darussalam juga sudah sesuai dengan prosedur pemberian sanksi. Adapun pelaksanaan dan tingkat kejujuran dan kedisiplinan santri dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian sanksi berjenjang sebagai upaya membangun *civic disposition* berupa sikap jujur dan disiplin pada santri, yaitu:
 - a. Hukuman diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh santri
Hukuman yang diberikan kepada santri berupa sanksi berjenjang diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang diperbuat. Pemberian hukuman di mulai dengan memberikan teguran hingga di keluarkan dari pesantren dengan hormat. Ketika memberikan teguran kepada santri tentu santri akan diberi pemahaman mengenai sikap yang baik dan buruk, memberikan kesempatan santri

untuk menjelaskan kronologi terjadinya pelanggaran. Sehingga secara tidak langsung akan dapat melatih santri untuk berkata jujur, selain sikap jujur yang dibangun, pemberian hukuman kepada santri juga memberikan efek jera yang membuat santri tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat bersikap lebih disiplin.

- b. Hukuman diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dan memiliki kesan positif bagi santri.
Hukuman berupa sanksi berjenjang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antar pengurus yang kemudian disahkan oleh pengasuh atau kepala pesantren. Setelah disahkan, sanksi berjenjang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tata tertib yang kemudian dijadikan sebagai dasar operasional pemberian sanksi berjenjang sekaligus pranata pembelajaran *civic disposition* terutamanya berkaitan dengan sikap jujur dan disiplin.
 - c. Pemberian hukuman harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan.
Pemberian Hukuman kepada santri akan menimbulkan dampak positif bagi santri, yaitu menyadarkan santri akan kesalahan yang telah dilakukan dan menimbulkan efek jera pada santri yang pada akhirnya santri tidak mengulangi kesalahannya lagi.
2. Tingkat kejujuran dan kedisiplinan antara santri yang pernah menerima sanksi berjenjang

dengan santri yang tidak menerima sanksi berjenjang, yaitu:

- a. Santri yang pernah menerima sanksi berjenjang memiliki tingkat kejujuran yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan santri yang tidak pernah menerima sanksi berjenjang.
- b. Santri yang pernah menerima sanksi berjenjang memiliki tingkat kedisiplinan yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan santri yang tidak pernah menerima sanksi berjenjang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Santri
 - a. Santri perlu meningkatkan kedisiplinan diri untuk menaati tata tertib atau peraturan yang berlaku sehingga usaha dalam membangun *civic disposition* pada santri dapat terwujud dengan baik.
 - b. Santri harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti semua kegiatan belajar-mengajar di pesantren utamanya berkaitan dengan pemberian pemahaman terhadap karakter kewarganegaraan yang baik yang harus dimiliki oleh setiap santri.
2. Bagi pengurus dan pengasuh
Pengurus dan pengasuh perlu memberikan pemahaman yang lebih kepada santri agar mempermudah upaya pesantren dalam membangun *civic disposition* utamanya berkaitan

dengan sikap jujur dan disiplin pada santri.

3. Bagi Pesantren
Pesantren perlu menjalin hubungan dengan orang tua/wali untuk bekerja sama dalam membangun *civic disposition* pada santri utamanya berkaitan dengan sikap jujur dan disiplin, jadi ketika santri berada di rumah orang tua/wali santri dapat berpartisipasi dalam upaya *membangun civic disposition* pada santri, baik itu dengan memberikan pemahaman terhadap santri hingga pengawasan agar santri tidak melakukan perilaku menyimpang sehingga pelaksanaannya dapat lebih maksimal.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini memiliki kekurangan yaitu peneliti hanya membahas mengenai *civic disposition* berupa sikap jujur dan disiplin pada santri, sehingga karakter privat yang lain pada *civic disposition* belum sepenuhnya diteliti oleh peneliti. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat meneliti bagian lain dari *civic disposition* sehingga karakter kewarganegaraan yang ada pada objek penelitian dapat dijelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadika, M., Suryono, H., & Nuryadi, M. H. (2021, February). Cultivating Character Education Based on Values Culturalin Students in the Globalization Era. In *1st International Conference on Character Education (ICCE 2020)* (pp. 146-150). Atlantis Press.
- Arif, S., Sama'i. (2015). Dampak Psikologis Pelaksanaan Sanksi Terhadap Santri di

- Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendang Agung, Kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial UNEJ.*, I(1):1-15.
- Judrah, M. (2016). HUKUMAN; (Tinjauan Perilaku Anak Didik). *AL-QALAM Jurnal Kajian Islam & Pendidikan.*, 8(2): 48-57.
- Khumaidi M. W. (2020). Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam*, 3(2): 134-149.
- Nafisa, M. B. (2020). *Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Jujur Pada Pembelajaran Bahasa Prancis Berbasis Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Wonosobo*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmatullah, A., Z. (2021). Hukuman dalam Perspektif Santri dan Pendidikan Pondok Pesantren. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1): 74-87.
- Rakhman, A. (2011). *Peningkatan Disiplin Sekolah Melalui Sanksi Berjenjang Pada Siswa Kelas III SDN Wonodadi 01 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Sofiyah, Ramdhani ES. (2002). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syahrone, W., Abdulkarim, A., & Komalasari, K. (2016). The Influence Of The Use Of The Textbook Based On Value As Resource Learnig Of Civic Education Towards Student`S Civic Disposition. *Jurnal Civicus*. Vol. 16(1): 88-100.
- Winarno, (2014). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, (2015). *Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi*. Termuat di Jurnal Humanika Vol 21 No 1 (2015). Tersedia di laman <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/9065>